

Gerakan Islam Radikal di Sulawesi Selatan: Pola Rekrutmen dan Pola Gerakan Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI) dan Laskar Jundullah

Bambang Karsono

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

e-Mail: ubj@ubharajaya.ac.id

Abstract

Preparatory Committee for the Upholding of Islamic Law (KPPSI) was established on 28 May 2000. Laskar Jundullah is an autonomous body under the KPPSI, but there is no effective coordination between Laskar Jundullah and KPPSI. In recruitment, membership of the KPPSI takes place openly, whereas Laskar Jundullah is more closed. This research explains the relationship between the two organizations, intended as a reference model to understand radical religious movements in the region. The data collected through interview, literature reviews, papers and related news. This study shows that an Islamic organization is not free from intact with radical Muslim groups. In fact, loose structure its even makes the organization more vulnerable to being used by the radical groups.

Keywords: Laskar Jundullah; KPPSI; Islamic Community Congress; radical movement; Shari'a regional regulations

Abstrak

Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI) didirikan pada 28 Mei 2000. Laskar Jundullah merupakan badan otonom di bawah KPPSI, namun demikian tidak terdapat koordinasi yang efektif antara Laskar Jundullah dan KPPSI. Dalam hal perekrutan kenaggotaan KPPSI berlangsung secara terbuka, sebaliknya Laskar Jundullah lebih tertutup. Penelitian ini mencoba menjelaskan hubungan antara keduanya, sekaligus diharapkan bisa menjadi rujukan dalam upaya memahami pergerakan salah satu model dari gerakan radikal keagamaan di daerah. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, penelusuran artikel, makalah, dan berita terkait. Penelitian ini menunjukkan bahwa organisasi Islam yang bersifat terbuka bukanlah jaminan terbebas dari hubungannya dengan kelompok radikal. Bahkan karena sifatnya yang longgar, rentan untuk dimanfaatkan.

Kata kunci: Laskar Jundullah; KPPSI; Kongres Umat Islam; gerakan radikal; Perda Syariat

Pendahuluan

Gerakan radikal kerap ditengarai sebagai reaksi dari sistem yang otoriter. Manuel Castells Oliván—sosiolog Spanyol, pakar ilmu sosial dan komunikasi—menyebutnya sebagai proses pembentukan identitas dalam kondisi tertekan oleh pihak lain, sehingga membangun resistansi dengan tujuan keberlangsungan hidup kelompok dan golongan. Identitas ini bisa digunakan untuk menggambarkan aksi Islam radikal, sebagai bentuk ekspresi ketidakpuasan, kefrustrasian, dan kekecewaan.¹ Politik identitas ini—menurut Samuel Huntington—menguat sebagai alternatif bagi penggantian pemerintahan otoriter dan bersaing dengan institusi modern yang masih lemah.² Pada pengalaman Orde Baru, di bawah militer, kelompok Islam bergerak secara diam-diam, bergerilya melakukan perlawanan ‘bawah tanah’. Di bawah tekanan sistem yang represif, gerakan Islam mengendap dengan strategi gerakan bawah tanah, hingga terbuka kesempatan politik sebagai medium perkembangan gerakan.³ Hal yang sering dijadikan argumen oleh gerakan Islam, terkait dengan sejarah awal pembentukan negara Indonesia, bahwa kelompok Islam memainkan peran penting membangun bangsa Indonesia, namun mengalami perlakuan diskrimantif dari pemerintah.

Salah satu peristiwa tragis yang dapat dijadikan contoh adalah kerusuhan Tanjung Priok. Kerusuhan Tanjung Priok kemudian digunakan oleh pemerintah sebagai alasan untuk menindak keras segala bentuk radikalisme Islam. Para dai dan politisi yang bersuara keras, bersama dengan orang-orang yang benar-benar bergaris keras, ditangkap, diadili dan dipenjara. Bahkan Islam digambarkan sebagai kekuatan ‘ekstrem kanan’—yang seperti ‘ekstrem kiri’, komunisme—harus dikontrol oleh pemerintah.⁴

Pengalaman pahit yang dirasakan kelompok Islam tersebut kemudian menjadi bentuk perlawanan. Mengikuti pemahaman fakta sosial, bahwa radikalisme adalah sebuah gerakan yang terkait atau disebabkan oleh fakta lain. Genealogi radikalisme dapat ditilik dari adanya tekanan politik penguasa. Di beberapa belahan dunia, termasuk Indonesia,

¹ Muzayyin Ahyar, “Membaca gerakan Islam radikal dan deradikalisasi gerakan Islam,” *Walisono* 23, no. 1 (2015): 22, doi:10.21580/WS.23.1.220.

² Endang Turmudi dan Riza Sihbudi, ed., *Islam dan Radikalisme di Indonesia* (Jakarta: LIPI Press, 2005), 34.

³ Dady Hidayat, “Gerakan Dakwah Salafi di Indonesia pada Era Reformasi,” *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi* 17, no. 2 (9 Juli 2012): 124, doi:10.7454/mjs.v17i2.3738.

⁴ Adrian Vickers, *Sejarah Indonesia Modern*, trans. oleh Arif Maftuhin (Yogyakarta: Insan Madani, 2011), 273–74.

radikalisme muncul sebagai akibat otoritarianisme.⁵ Ditambah sebelumnya telah ada pengalaman cita-cita mendirikan negara Islam seperti DI/TII pimpinan S.M. Kartosoewirjo. Baru kemudian menjelang akhir kekuasaan Presiden Soeharto, kelompok-kelompok Islam yang tadinya terpinggirkan, mendapat tempat yang lebih 'strategis'.⁶

Marjinalisasi dan diskriminasi menjadi salah satu alasan kuat munculnya gerakan radikal—baik yang berbasis keagamaan maupun yang tidak berbasis keagamaan. Gerakan radikal adalah respon dari masyarakat yang merasa tidak mendapat perlakuan adil dan tidak mendapatkan haknya sebagai warga negara—misalnya kurang atau tertutupnya akses ke sumber daya. Radikalisme adalah cara masyarakat bersikap terhadap kekuasaan.⁷ David Wright-Neville—*Australian academic*, spesialis hubungan internasional dan terorisme, mengklasifikasikan gerakan Islam di Malaysia dan Indonesia menjadi *activist*, *militant*, dan *terrorist*. Kategori ini untuk membedakan tiga macam agenda aksi: aksi yang bertujuan sekadar mengubah kebijakan politik agar bernuansa Islami; aksi yang bertujuan bukan saja untuk mengubah kebijakan, tapi juga untuk mengganti hierarki politik yang lebih berpihak pada umat Islam; dan aksi yang bertujuan melakukan perubahan radikal terhadap tatanan sosial dengan menggunakan kekerasan.⁸

Lahirnya kelompok-kelompok radikal keagamaan merupakan respon kekecewaan terhadap peran negara. Alasan lain munculnya gerakan radikalisme adalah kegagalan rezim sekular dalam merumuskan kebijakan dan mengimplementasikannya ke dalam kehidupan masyarakat. Kegagalan pembangunan yang mengakomodasi teori-teori modernisasi, ternyata berdampak terhadap ketidakpercayaan masyarakat terhadap model pembangunan yang diadopsi dari pengalaman negara Barat.⁹ Dengan demikian, antara negara dan masyarakat, keduanya saling menopang tumbuhnya bibit-bibit radikalisme. Ketika negara (dianggap)

⁵ Nur Syam, *Tantangan Multikulturalisme Indonesia: Dari Radikalisme Menuju Kebangsaan* (Yogyakarta: Kanisius, 2009), 124.

⁶ Lebih lengkapnya dapat dibaca: M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005).

⁷ Perihal diskriminasi dan ketidakadilan sebagai faktor pemicu munculnya benih radikalisme, dapat juga merujuk pada: Ali Asghar, *Men-Teroris-Kan Tuhan!: Gerakan Sosial Baru* (Jakarta: Pensil-324, 2014). Risetnya fokus pada isu ketidakadilan struktural terhadap Politik Islam sehingga melahirkan radikalisme.

⁸ Eric Hiariiej, "Aksi dan Identitas Kolektif Gerakan Islam Radikal di Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 14, no. 2 (November 2010): 132–33, doi:<https://doi.org/10.22146/jsp.10934>.

⁹ Syam, *Tantangan Multikulturalisme Indonesia: Dari Radikalisme Menuju Kebangsaan*, 125.

gagal mengimplementasikan keadilan hukum sebagai upaya melindungi warganya, radikalisme keagamaan muncul sebagai upaya perlindungan diri akibat kegagalan negara tersebut. Meskipun sinyalemen ini masih menyimpan kedangkalan makna, karena sifat tafsirnya yang sektarian dan kurang mengedepankan kepentingan yang lebih umum, dan inklusif dalam menciptakan hubungan sosial kemasyarakatan.¹⁰

Pada 2015, Mabes Polri memetakan gerakan radikal di Indonesia – terdapat 17 organisasi, 4 di antaranya terpantau menyusup ke wilayah Sulawesi Selatan: Mujahidin Indonesia Timur (MIT), ISIS, Laskar Jundullah, dan Negara Islam Indonesia (NII). Empat organisasi tersebut terindikasi menggunakan paham radikalisme. Khusus Laskar Jundullah dan NII, keduanya ditengarai berafiliasi dengan paham kelompok ISIS di Sulsel. Di Sulsel, terdapat delapan daerah yang diduga menjadi basis gerakan dan paham radikalisme, yaitu: Kabupaten Wajo, Sidrap, Bone, Luwu, Bulukumba, Enrekang, Gowa, dan Maros.¹¹

Penelitian ini dilakukan pada 2009, namun hasilnya belum pernah disebarluaskan. Kemudian dilakukan penyesuaian data sesuai perkembangannya. Pengumpulan dilakukan dengan metode wawancara, penelusuran artikel, makalah, dan berita terkait.

KPPSI

Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI) dibentuk sebagai hasil dari Kongres Umat Islam se-Sulawesi Selatan – diselenggarakan pertama kali di Asrama Haji Sudiang, Makassar pada 19–20 Oktober 2000. Kongres merekomendasikan terbentuknya sebuah forum (lembaga) yang bisa menjadi wadah bagi semua komponen strategis masyarakat di Sulawesi Selatan untuk mendorong dan memfasilitasi wacana yang lebih terbuka dan konstruktif tentang agenda Pemberlakuan Syariat Islam.

Pada saat kampanye internasional untuk memerangi terorisme (*war on terror*) – pasca peledakan gedung WTC dan Pentagon di Amerika Serikat – KPPSI dan Laskar Jundullah pun menjadi sorotan publik. Pandangan ini kemungkinan disebabkan oleh kedekatan Agus Dwikarna, pimpinan Laskar Jundullah, dengan Umar al-Faruq, seorang yang disebut-sebut sebagai agen al-Qaidah di Asia Tenggara. Selain itu, di tahun 2001, Dwikarna mengirim anggota Laskar Jundullah ke Afghanistan untuk berlatih merakit bom dengan bantuan al-Faruq. Tokoh Laskar Jundullah

¹⁰ Dede Mariana, “Radikalisme Agama & Politik,” *Pikiran Rakyat*, 2017.

¹¹ “Empat Jaringan Radikal Menyusup ke Sulsel,” *Jawa Pos*, 12 Mei 2015.

lainnya yang juga dikenal dekat dengan al-Faruq adalah Mukhtar Daeng Lau – Wakil Panglima Laskar Jundullah.¹²

Berdasarkan pada perkembangan global isu terorisme tersebut, maka pada Kongres Umat Islam II – diselenggarakan pada 19-31 Desember 2001 – KPPSI mempertegas visi pembentukan dan perjuangannya, yakni: “KPPSI adalah wahana aliansi yang bersifat independen dengan mempersatukan segenap potensi umat Islam Sulawesi Selatan untuk tegaknya Syariat Islam.” Adapun pola perjuangan dan tujuan strategisnya dirumuskan dalam misi: “Penegakan Syariat Islam di Sulawesi Selatan secara legal formal melalui perjuangan politik konstitusional, demokratis dan tegas dalam bingkai NKRI, guna memperoleh otonomi khusus, sehingga syariat Islam menjadi sumber rujukan dalam kehidupan pribadi, masyarakat, berbangsa dan bernegara.”¹³

Berdasarkan pada misi tersebut, maka terdapat tiga pilar perjuangan KPPSI, yaitu: *pertama*, konstitusional, dengan demikian, pilihan Negara Islam menjadi tidak relevan. *Kedua*, demokratis, praktik dan perjuangan KPPSI bukan melalui jalur kekerasan. *Ketiga*, perjuangan KPPSI tetap dalam bingkai NKRI. Tiga prinsip perjuangan tersebut memberikan garansi bahwa KPPSI adalah organisasi terbuka.¹⁴ KPPSI bersifat organisasi aliansi, yang berfungsi sebagai lembaga koordinasi, dalam rangka mengoptimalkan seluruh potensi umat Islam Sulawesi Selatan.

Cakupan program KPPSI meliputi berbagai bidang yang secara langsung bersentuhan dengan struktur kekuasaan politik negara. program tersebut, meliputi:¹⁵

1. Bidang politik yang membangun kekuatan umat Islam dalam upaya memperjuangkan tegaknya syariat Islam secara konstitusional dan berbagai persoalan lain;
2. Bidang hukum dan perundang-undangan yang merumuskan aturan-aturan hukum dan perundang-undangan berdasarkan syariat Islam beserta program lainnya;

¹² Zulfadli, “Radikalisme Islam dan Motif Terorisme di Indonesia,” *AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam* 22, no. 1 (22 Juni 2017): 184, doi:10.32332/akademika.v22i1.570. Informasi tentang Umar al-Faruq, dapat juga merujuk ke Bambang Karsono, *Jejak Aktivis JAT: Studi Kasus JAT & Jaringan Aceh-Pamulang* (Jakarta: Ubhara Jaya Press, 2018), 70.

¹³ Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam, “Mengenal KPPSI Sulsel: Otonomi Khusus Sulawesi Selatan untuk Tegaknya Syariat Islam,” Diklat (KPPSI, 2003), 9.

¹⁴ Wawancara dengan Sekjen KPPSI, Aswar Hasan, di Makassar, 18 September 2003 dalam Tim Peneliti Staf Ahli Bidang Sosial Budaya BIN, *Laskar Jundullah Sulawesi Selatan; Perspektif Keamanan dan Sosial Budaya* (Jakarta: Badan Intelijen Negara, 2009), 26.

¹⁵ Syarifuddin Jurdi, *Kekuatan-kekuatan Politik Indonesia; Kontestasi Ideologi dan Kepentingan*, 1 ed. (Jakarta: Kencana, 2016), 241–42.

3. Bidang ekonomi dan perdagangan yang menekankan pada aspek perumusan aturan-aturan perekonomian dan perdagangan berdasarkan syariat Islam dan menyosialisasikannya kepada seluruh umat Islam;
4. Bidang pendidikan yang bertugas merumuskan sistem pendidikan Islam yang menjaga umat dari pola pikir sekularisme dan materialisme yang sangat mengancam akidah umat Islam;
5. Bidang sosial budaya yang merumuskan aturan kehidupan bermasyarakat Muslim dan non-Muslim dalam batas-batas syariat Islam;
6. Bidang hubungan kelembagaan dan masyarakat yang menekankan pada pembentukan perwakilan masyarakat Sulawesi Selatan pendukung penegak syariat Islam di Sulawesi Selatan yang berada di luar Sulawesi Selatan; dan
7. Bidang laskar penegak syariat Islam yang bertugas membentuk Laskar Jundullah sebagai pengawal penegakan syariat Islam di Sulawesi Selatan.

Pembentukan Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI) pada tahun 2000 menimbulkan keresahan di Sulawesi. Tujuan utamanya adalah otonomi khusus untuk Sulawesi Selatan untuk memfasilitasi pemberlakuan hukum syariat. Pada Desember 2001 KPPSI mengumumkan sebuah rancangan undang-undang mengenai pemberlakuan Syariat di Sulawesi Selatan, dan mengusulkan agar provinsi itu diberi status sama dengan Aceh. Agenda politik KPPSI dan hubungan-hubungannya dengan Islam Ekstremis menimbulkan keprihatinan yang semakin meningkat mengenai ambisi-ambisi Islam politis di Sulawesi.¹⁶

Kongres Umat Islam IV (6-7 Februari 2010) Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI), mempertegas komitmen pemberlakuan syariat Islam di Sulawesi Selatan. Kongres membahas upaya pembebasan Agus Dwikarna, yang ditahan di Filipina karena memperjuangkan Syariat Islam.¹⁷

Perkembangan wacana penegakan syariat Islam di Sulawesi Selatan, kemudian direspons oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan

¹⁶ ICG (2002); Dias Pradadimara & Burhaman Junedding (2002) dalam Henk Schulte Nordholt dan Gerry Van Klinken, ed., *Politik Lokal di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia dan KITLV-Jakarta, 2014), 181.

¹⁷ Tempo.co, "Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam Sulsel Pertegas Urgensi," *TEMPO Interaktif*, 2 Februari 2010, <https://nasional.tempo.co/read/222968/komite-persiapan-penegakan-syariat-islam-sulsel-pertegas-urgensi/full&view=ok>.

melakukan jajak pendapat, melibatkan 280 responden di 24 kabupaten/kota. Hasilnya, 91 persen responden mendukung penegakan Syariat Islam, meski demikian didapati bahwa pemahaman tentang Syariat Islam masih bervariasi – tidak terdapat keseragaman konsep.¹⁸

Di Sulawesi Selatan, daerah yang pertama memberlakukan perda berbasis Syariat Islam adalah Kabupaten Bulukumba. Bulukumba menetapkan Perda No. 3 Tahun 2003 tentang larangan, pengawasan, penertiban, dan penjualan miras; Perda No. 2 Tahun 2003 tentang pengelolaan zakat, infaq dan sodaqoh; Perda No. 5 Tahun 2003 tentang berpakaian muslim dan muslimah.¹⁹

Laskar Jundullah

Laskar Jundullah adalah organisasi tertutup yang muncul sejak tahun 2000. Terlibat cukup mencolok dalam konflik Poso dan Ambon. Laskar Jundullah kemudian semakin dikenal ketika sebagian anggotanya terbukti terlibat dalam aksi bom Makassar, Desember 2002.²⁰

Laskar Jundullah mulai diperkenalkan ke publik saat dialog terbuka “Pelaksanaan Syariat Islam” di Sulawesi Selatan – 28 Mei 2000 – berbarengan dengan kelahiran Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI). Laskar Jundullah disahkan pada Kongres Umat Islam Sulawesi Selatan di Asrama Haji Sudiang, Makassar, Oktober 2000. Sejak awal kehadirannya, Laskar Jundullah menginduk ke KPPSI.²¹

Itulah sebabnya pertemuan KPPSI di Makassar dijaga ketat oleh kelompok paramiliter yang disebut Laskar Jundullah (Tentara Allah), satuan tugas pengamanan reguler KPPSI.²² Ketika hubungan antara Laskar Jundullah dengan kekerasan ekstremisme Islam terkuak, KPPSI

¹⁸ Tempo.co, “91 Persen Warga Sulawesi Selatan Mendukung Syariat Islam,” *TEMPO Interaktif*, 17 Juli 2003, <https://nasional.tempo.co/read/1804/91-persen-warga-sulawesi-selatan-mendukung-syariat-islam>.

¹⁹ Dalmeri, “Prospek Demokrasi: Dilema antara Penerapan Syariat Islam dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia,” *Salam: Jurnal Studi Masyarakat Islam* 15, no. 2 (Desember 2012): 233, [http://download.portalgaruda.org/article.php?article=97959&val=276&title=Prospek Demokrasi: Dilema antara Penerapan Syariat Islam dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=97959&val=276&title=Prospek%20Demokrasi%3A%20Dilema%20antara%20Penerapan%20Syariat%20Islam%20dan%20Penegakan%20Hak%20Asasi%20Manusia%20di%20Indonesia).

²⁰ Tim Peneliti Staf Ahli Bidang Sosial Budaya BIN, *Laskar Jundullah Sulawesi Selatan; Perspektif Keamanan dan Sosial Budaya*, 41.

²¹ Hidayat Tantan, Zaenal Dalle, dan Kholis Bahtiar Bakri, “O...O... Komandan Terjebak Bom,” *Gatra*, Laporan Utama, 25 Maret 2002.

²² Muhamad Hisyam, “The Preparatory Committee for Implementation of Sharia (KPPSI): An Islamic Resurgence in South Sulawesi,” 16–17, diakses 29 Oktober 2018, [http://repository.tufs.ac.jp/bitstream/10108/68069/1/ISEA11_session_1-1\[Muhamad](http://repository.tufs.ac.jp/bitstream/10108/68069/1/ISEA11_session_1-1[Muhamad).

menjauhkan diri dari organisasi itu.²³ Meskipun sebelumnya Sekjen KPPSI pernah membantah anggapan bahwa Laskar Jundullah disiapkan sebagai sayap “militer” KPPSI. Alasannya, laskar ini hanya menjadi petugas pengamanan pelaksanaan syariat Islam.²⁴

Selain mengirim pasukan ke wilayah konflik – Poso dan Ambon – Laskar Jundullah juga melakukan kampanye melawan prostitusi, pornografi, minuman keras, obat-obat terlarang, dan perjudian.²⁵ Misalnya, tidak lama setelah berdiri, mereka merazia Pub dan Karaoke The Blues di Hotel Country Inn di Jalan Haji Bau serta Diskotek Terminal One di Jalan Russa, Makassar.²⁶

Laskar Jundullah merupakan organisasi paramiliter yang tidak berafiliasi dengan organisasi massa Islam besar mana pun. Dari namanya, bisa dikatakan bahwa Laskar Jundullah memang dibentuk untuk menjaga penegakan syariah.²⁷

Laskar Jundullah dipimpin oleh Agus Dwikarna, organisasi ini didirikan di Makassar dalam September 2000. Dwikarna adalah seorang anggota komite eksekutif MMI. Agus Dwikarna pernah ditahan di Filipina pada tahun 2002 atas tuduhan kepemilikan bahan-bahan peledak dan menjadi anggota jaringan yang terkait dengan Al Qaeda. Selain itu, Agus Dwikarna juga dituding terlibat pengeboman Kedutaan Besar Filipina di Jakarta, jual-beli senjata, dan pengeboman Kedutaan Besar Amerika di Filipina. Hingga kemudian dibebaskan pada 31 Desember 2013.²⁸

Laskar Jundullah adalah milisi regional di Sulawesi Selatan, yang diklaim memiliki hubungan historis dengan gerakan Darul Islam. Juga terlibat aktif di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, dalam konflik antara Kristen dan Muslim.²⁹

²³ ICG (2003, 2004); Dias Pradadimara & Burhaman Junedding (2002) dalam Nordholt dan Klinken, *Politik Lokal di Indonesia*, 181–82.

²⁴ “Wawancara dengan Sekjen KPPSI, Aswar Hasan” (Makassar, 18 September 2003) dalam Tim Peneliti Staf Ahli Bidang Sosial Budaya BIN, *Laskar Jundullah Sulawesi Selatan; Perspektif Keamanan dan Sosial Budaya*.

²⁵ Hiariej, “Aksi dan Identitas Kolektif Gerakan Islam Radikal di Indonesia,” 143.

²⁶ Tantan, Dalle, dan Bakri, “O...O... Komandan Terjebak Bom.”

²⁷ Hisyam, “The Preparatory Committee for Implementation of Sharia (KPPSI): An Islamic Resurgence in South Sulawesi,” 16–17.

²⁸ ICG (2002) dalam Nordholt dan Klinken, *Politik Lokal di Indonesia*, 181. Lihat juga: “Filipina Bebaskan Agus Dwikarna Setelah Ditahan Lebih 11 Tahun,” *Tribunnews.com*, 3 Januari 2014, <http://www.tribunnews.com/nasional/2014/01/03/filipina-bebaskan-agus-dwikarna-setelah-ditahan-lebih-11-tahun>.

²⁹ Martin van Bruinessen, “The violent fringes of Indonesia’s Islam,” *ISIM Newsletter*, 11 Desember 2002, <https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/20380>.

Sejak awal keberadaannya, pembicaraan mengenai KPPSI, selalu diasosiasikan secara langsung dengan nama Laskar Jundullah. Laskar Jundullah memang merupakan amanat Kongres Umat Islam I tahun 2000 di Makassar. Amanat tersebut dituangkan dalam program membentuk Laskar Penegak Syariat Islam, yang kemudian lebih dikenal dengan nama Laskar Jundullah.

Namun, setelah tertangkapnya Agus Dwikarna, Laskar Jundullah seolah hilang dari peredaran. Ketika diwawancarai, Dr. Hamka Haq dengan tegas mengatakan, bahwa dia tidak tahu apa itu Laskar Jundullah.³⁰ Senada dengan pernyataan Prof. Dr. Basalamah—pernah menjabat sebagai pembina KPPSI—bahwa tidak ada lagi Laskar Jundullah.³¹

Menariknya memang, dalam Kongres Umat Islam I laskar ini disebut sebagai Laskar Penegak Syariat Islam, yang kemudian lebih dikenal dengan nama Laskar Jundullah.

Tertangkapnya Agus Dwikarna banyak mempengaruhi kegiatan-kegiatan Laskar Jundullah. Namanya kembali muncul setelah dinyatakan bahwa dua orang tersangka pengeboman Mc Donald di Makassar adalah anasir dari Laskar Jundullah.

Pola Rekrutmen dan Pola Gerakan

Secara umum, tidak banyak informasi dan data yang dapat menggambarkan model organisasi laskar Jundullah. Secara organisatoris, Laskar Jundullah merupakan badan otonom di bawah KPPSI. Namun dalam hal perekrutan keanggotaan KPPSI berlangsung secara terbuka, sebaliknya Laskar Jundullah lebih tertutup. Konsekuensinya, anggota Laskar Jundullah harus melewati proses rekrutmen khusus dan nyaris tidak mengandalkan catatan administrasi. Dan ini merupakan ciri organisasi yang menerapkan sistem sel tertutup.

Sebagai badan otonom dari KPPSI, Laskar Jundullah memiliki kepengurusan yang berdiri sendiri. Dan tampaknya tidak ada koordinasi efektif antara KPPSI dengan kegiatan-kegiatan Laskar Jundullah.

Pola rekrutmen anggota Laskar Jundullah dapat digambarkan sebagai berikut: *pertama*, anggota resmi akan mendekati calon anggota.

³⁰ "Wawancara dengan Dr. Hamka Haq" (17 September 2003) dalam Tim Peneliti Staf Ahli Bidang Sosial Budaya BIN, *Laskar Jundullah Sulawesi Selatan; Perspektif Keamanan dan Sosial Budaya*.

³¹ "Wawancara dengan Prof. Dr. Basalamah" (Makassar, 19 September 2003) dalam *ibid.*

Proses pendekatan bisa dilakukan dengan berbagai cara, misalnya melalui kedekatan kekerabatan, atau sama-sama pernah aktif pada sebuah organisasi. Kegiatan paling sering dilakukan adalah mengajak calon anggota mengikuti pengajian umum dengan materi yang masih bersifat umum.

Kedua, calon anggota akan dideteksi latar belakang kegiatannya, keluarganya, dan pemikirannya. *Ketiga*, calon anggota akan mulai diperkenalkan visi dan misi organisasi, tapi bersifat umum. *Keempat*, setelah calon anggota menunjukkan loyalitasnya pada organisasi, maka mulai direkrut melalui proses rekrutmen khusus dengan materi khusus, misalnya membuat penyamaran yang efektif, sasaran inti organisasi, dan sterusnya.

Kelima, setelah mampu membuktikan diri sebagai anggota yang potensial, calon anggota akan di-baiat (disumpah) oleh anggota senior. Dengan demikian, calon anggota tersebut dinobatkan sebagai anggota resmi, dan wajib mengikuti pola dan peraturan organisasi, seperti taat dan patuh pada pimpinan di kelompoknya dan pimpinan teras organisasi; kepentingan pribadinya dilebur dengan kepentingan organisasi; siap ditugaskan di mana dan kapan pun serta tugas apapun; dan tentu harus menjaga kerahasiaan organisasi.

Oleh karena itu, tidak aneh jika Laskar Jundullah tidak banyak diketahui oleh publik. Bahkan sebagian besar pengurus KPPSI tidak mengetahui secara terperinci tentang keberadaan Laskar Jundullah.

Menurut keterangan Sekjen KPPSI, Laskar Jundullah memiliki anggota sekitar 10.000 (sepuluh ribu) orang dengan usia rata-rata di bawah tiga puluh tahun. Namun, tidak ada data konkret untuk membuktikan jumlah tersebut.³² Jika berdasar pada data majalah Gatra, disebutkan bahwa Laskar Jundullah mengklaim punya 5.000 anggota.³³ Namun berdasarkan keterangan salah seorang anggota Laskar Jundullah, bahwa yang benar-benar aktif hingga di tahun 2003 diperkirakan hanya sekitar 300-an orang.

Laskar Jundullah mengandalkan tiga jenis jaringan untuk perekrutan anggota. *Pertama*, para pengikut Darul Islam, khususnya pengikut Sanusi Daris –menjabat Menteri Pertahanannya Qahar Mudzakkar. *Kedua*, faksi garis keras dari organisasi Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO). Agus Dwikarna berlatar belakang

³² “Wawancara dengan Sekjen KPPSI, Aswar Hasan” (Makassar, 18 September 2003) dalam ibid.

³³ Tantan, Dalle, dan Bakri, “O...O... Komandan Terjebak Bom.”

HMI-MPO. *Ketiga*, umat Muslim lokal di wilayah konflik, seperti Ambon dan Poso.³⁴

Seperti umumnya organisasi radikal, Laskar Jundullah tampaknya sangat hati-hati. Kerahasiaan gerakan dianggap sebagai kunci sukses perjuangan hingga masa mendatang. Cara-cara rahasia yang dimaksud: *pertama*, kerahasiaan kegiatan, yaitu bergerak secara diam-diam tanpa tergiur memamerkan kepada publik. Dapat juga bergerak dengan mengatasnamakan lembaga tertentu. Pertemuan-pertemuan dapat dilakukan dengan cara kunjungan wisata, namun hanya pucuk pimpinan yang berhak menentukan jenis kegiatan. *Kedua*, kerahasiaan organisasi, yakni struktur organisasi dirahasiakan untuk umum, terutama bagi musuh-musuh dakwah Islam. Bahkan ada beberapa divisi atau biro organisasi yang harus dirahasiakan dari anggota biasa, dengan pertimbangan bisa saja tanpa sadar membuka rahasia ini kepada musuh-musuh dakwah Islam. Karena itu, pimpinan harus mampu memberi pengertian kepada anggotanya tentang kebijakan kerahasiaan struktur organisasi.³⁵

Ketiga, kerahasiaan pimpinan, yakni merahasiakan nama-nama anggota pimpinan kepada khalayak, terutama staf pimpinan yang bertanggung jawab dalam gerakan. Dalam hal kerahasiaan individu, bisa dengan cara menggunakan nama samaran.³⁶

Pola Klaster-klaster

Untuk menggambarkan jaringan pola kelompok radikal organisasi Islam garis keras, mungkin contoh yang bisa mewakili adalah kisah pembunuhan Presiden Mesir, Anwar Saddat, pada 6 Oktober 1981. Menurut data dan keterangan yang muncul selama pengadilan, para tersangka – Khalid Islambuli, “Atha Thayil Hamidah Rahil, dan Husain Abbas Muhammad – ternyata tiga eksekutor pembunuhan tersebut tidak pernah mendapat perintah pembunuhan dari atasannya (*amir*) secara langsung.³⁷

³⁴ International Crisis Group, “Indonesia Backgrounder: How The Jemaah Islamiyah Terrorist Network Operates,” *ICG Asia Report N°43* (Jakarta/Brussels: International Crisis Group, 11 Desember 2002), 25, [http://www.seasite.niu.edu/indonesian/islam/ICG-Indonesia Backgrounder Jl.pdf](http://www.seasite.niu.edu/indonesian/islam/ICG-Indonesia%20Backgrounder%20Jl.pdf).

³⁵ Syaikh Mushthafa Mansyhur, *Amal Jama’i*, trans. oleh Abu Ridha, Cetakan Kedua (Jakarta: Al-I’tishom Cahaya Ummat, 2003), 60–63.

³⁶ Ibid.

³⁷ Muhammad Hasanain Haikal, *Khariful-gadhab: Kisah Pembunuhan Anwar Saddat* (Cairo: Markazul-Ahram, 1987), 421.

Fakta tersebut menunjukkan telah terjadi kemajuan dalam mekanisme dan garis komando pada organisasi Islam garis keras. Terjadi perubahan sistem jaringan organisasi dari “metode laba-laba” menjadi “metode klaster-klaster” (metode gugus atau metode tandan).³⁸

Pada sistem klaster-klaster – biasanya beranggotakan tujuh sampai sembilan orang – membentuk kelompok yang berbentuk gugus. Kemudian akan muncul kelompok lain dengan jumlah dan formasi yang sama, dan begitu seterusnya. Masing-masing gugus berdiri sendiri. Setiap klaster dapat terurai dari satu titik/sumber. Memotong jaringan satu klaster-klaster tidak akan berpengaruh pada posisi klaster-klaster pusat, demikian juga dengan klaster-klaster lainnya.

Dengan demikian, sistem klaster ini jauh lebih efektif dibanding “sistem laba-laba”. Sebab, dalam sistem laba-laba, jika bagian luar jaringan terganggu – misalnya, ada anggota yang tertangkap – maka akan mudah terlacak sampai ke titik pusat jaringan. Minimal, pusat jaringan akan sangat terganggu dan membuang banyak energi untuk waspada.

Pola klaster ini mungkin sedikit bisa menjelaskan pola laskar Jundullah. Bahwa keterlibatan anasir dari Laskar Jundullah dalam aksi pengeboman tidak serta merta menyeret Organisasi Laskar Jundullah secara keseluruhan. Misalnya, terjadi pengeboman pada 5 Desember 2002 di Makassar tepatnya di Restoran McDonald’s, berlokasi di lantai dasar Mal Ratu Indah – menyebabkan 3 orang meninggal, 15 orang luka-luka – dan ledakan di Show Room NV Hadji Kalla di Jalan Urip Sumoharjo. Dari peristiwa pengeboman itu, polisi menetapkan 6 tersangka, yakni: Azhar Daeng Salam (tewas saat membawa bom di McDonald’s), Muchtar Daeng Lau, Usman, Agung Hamid, Mas Nur, dan Ilham.³⁹ Ilham adalah salah satu anggota Laskar Jundullah, yang dipimpin oleh Agung Hamid – kepemimpinan setelah Agus Dwikarna.⁴⁰ Nama lain yang muncul adalah Antaon Labase. Sesuai pengakuannya, ia menyesali keterlibatannya dalam bom makassar. Alasannya, setiap tindakan dilakukan berdasarkan emosional untuk membela umat Islam, dan tidak memperhatikan sisi legalitas Syar’i-nya.⁴¹

³⁸ Ibid.

³⁹ Tempo.co, “Polisi Tetapkan 6 Tersangka Bom Makassar,” *TEMPO Interaktif*, 9 Desember 2003, <https://nasional.tempo.co/read/33921/polisi-tetapkan-6-tersangka-bom-makassar>.

⁴⁰ “Terdakwa Bom Makassar Akui Simpan 5 Karung Potasium,” *detiknews*, 2 Juni 2005, <https://news.detik.com/berita/373692/terdakwa-bom-makassar-akui-simpan-5-karung-potasium>.

⁴¹ Keterangan Anton Labase, Kamis, 16 Agustus 2007 dalam Tim Peneliti Staf Ahli Bidang Sosial Budaya BIN, *Laskar Jundullah Sulawesi Selatan; Perspektif Keamanan dan Sosial*

Meskipun ada anggotanya yang terkait dengan aksi pengeboman, Laskar Jundullah masih tetap eksis meskipun semakin jarang terdengar. Misalnya di Bulukumba, karena telah terbit Perda Syariah, pada 2013 Laskar Jundullah selaku “polisi syariat” mendatangi Ramayana untuk meminta pihak manajemen agar memerintahkan karyawannya memakai jilbab.⁴²

Catatan Penutup

Dalam perjalanannya, perjuangan penegakan syariat Islam di Sulawesi Selatan, terdapat kekhawatiran di kalangan internal KPPSI, bahwa apabila wacana pemberlakuan syariat Islam disampaikan secara terbuka, maka akan mudah KPPSI dikaitkan dengan DI/TII Qahar Mudzakkar. Untuk itu, Ketua Umum KPPSI, Abd Aziz Qahar Mudzakkar – putra bungsu Qahar Mudzakkar – memberikan penjelasan bahwa perjuangannya berbeda dari bapaknya dalam hal metode, namun secara substansi merupakan kelanjutan perjuangannya.

Pola perjuangan KPPSI tampak cepat menuai hasil dengan ditetapkannya Perda berbasis Syariat Islam. Namun ia juga mendapat tentangan dari berbagai komponen masyarakat, seperti yang dipelopori oleh LAPAR (Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat) Makassar.⁴³ KPPSI memahami bahwa tujuan penegakan syariat Islam akan efektif dilakukan dengan memanfaatkan sistem politik yang sedang berjalan.

Sejak awal kehadirannya, Laskar Jundullah telah menimbulkan kesan menakutkan di sebagian kalangan, bahkan dari peserta Kongres Umat Islam sendiri. Penjagaan ketat oleh Laskar Jundullah memberikan kesan keras. Terdapat kritikan, bahwa kongres telah menyebarkan rasa takut.⁴⁴

Penelitian ini menunjukkan bahwa organisasi Islam yang bersifat terbuka – meskipun mendasarkan pola gerakannya berdasarkan konstitusi negara – bukanlah jaminan terbebas dari hubungannya dengan kelompok radikal. Bahkan karena sifatnya yang longgar, rentan untuk

Budaya, 97.

⁴² “Karyawan Ramayana Bulukumba Diminta Berjilbab,” *Tribun-Timur.com*, 30 Juni 2013, <http://makassar.tribunnews.com/2013/06/30/karyawan-ramayana-bulukumba-diminta-berjilbab>.

⁴³ Dalmeri, “Prospek Demokrasi: Dilema antara Penerapan Syariat Islam dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia,” 233.

⁴⁴ Hisyam, “The Preparatory Committee for Implementation of Sharia (KPPSI): An Islamic Resurgence in South Sulawesi,” 17.

dimanfaatkan. Meskipun telah ada jaminan dari Ketua Umum KPPSI, namun tetap perlu diingat bahwa proses radikalisis tetap mengacu kepada semacam proses perubahan – sering kali secara sengaja dan sistematis difasilitasi atau diarahkan oleh orang lain.⁴⁵ Sedangkan untuk organisasi tertutup sektarian pada dasarnya, sangat terbuka kemungkinan bertransformasi menjadi gerakan radikal.

Perjuangan yang ditunjukkan oleh KPPSI – juga Laskar Jundullah – menunjukkan bahwa wacana penegakan syariat Islam memiliki pengaruh kuat dalam penentuan kebijakan, juga bisa menjadi instrumen kekuasaan, baik lokal maupun nasional.[]

Daftar Pustaka

- Ahyar, Muzayyin. "Membaca gerakan Islam radikal dan deradikalisis gerakan Islam." *Walisongo* 23, no. 1 (2015): 1–26. doi:10.21580/WS.23.1.220.
- Asghar, Ali. *Men-Teroris-Kan Tuhan!: Gerakan Sosial Baru*. Jakarta: Pensil-324, 2014.
- Borum, Randy. "Radicalization into Violent Extremism I: A Review of Social Science Theories." *Journal of Strategic Security* 4, no. 4 (2011): 7–36. doi:10.5038/1944-0472.4.4.1.
- Bruinessen, Martin van. "The violent fringes of Indonesia's Islam." *ISIM Newsletter*, 11 Desember 2002. <https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/20380>.
- Dalmeri. "Prospek Demokrasi: Dilema antara Penerapan Syariat Islam dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia." *Salam: Jurnal Studi Masyarakat Islam* 15, no. 2 (Desember 2012): 228–39. [http://download.portalgaruda.org/article.php?article=97959&val=276&title=Prospek Demokrasi: Dilema antara Penerapan Syariat Islam dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=97959&val=276&title=Prospek%20Demokrasi:%20Dilema%20antara%20Penerapan%20Syariat%20Islam%20dan%20Penegakan%20Hak%20Asasi%20Manusia%20di%20Indonesia).
- "Empat Jaringan Radikal Menyusup ke Sulsel." *Jawa Pos*, 12 Mei 2015.
- "Filipina Bebaskan Agus Dwikarna Setelah Ditahan Lebih 11 Tahun." *Tribunnews.com*, 3 Januari 2014. <http://www.tribunnews.com/>

⁴⁵ Randy Borum, "Radicalization into Violent Extremism I: A Review of Social Science Theories," *Journal of Strategic Security* 4, no. 4 (2011): 13, doi:10.5038/1944-0472.4.4.1.

- nasional/2014/01/03/filipina-bebaskan-agus-dwikarna-setelah-ditahan-lebih-11-tahun.
- Haikal, Muhammad Hasanain. *Khariful-gadhab: Kisah Pembunuhan Anwar Saddat*. Cairo: Markazul-Ahram, 1987.
- Hiariej, Eric. "Aksi dan Identitas Kolektif Gerakan Islam Radikal di Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 14, no. 2 (November 2010): 131–68. doi:<https://doi.org/10.22146/jsp.10934>.
- Hidayat, Dady. "Gerakan Dakwah Salafi di Indonesia pada Era Reformasi." *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi* 17, no. 2 (9 Juli 2012): 115–33. doi:10.7454/mjs.v17i2.3738.
- Hisyam, Muhamad. "The Preparatory Committee for Implementation of Sharia (KPPSI): An Islamic Resurgence in South Sulawesi." Diakses 29 Oktober 2018. [http://repository.tufs.ac.jp/bitstream/10108/68069/1/ISEA11_session_1-1\[Muhamad](http://repository.tufs.ac.jp/bitstream/10108/68069/1/ISEA11_session_1-1[Muhamad).
- International Crisis Group. "Indonesia Backgrounder: How The Jemaah Islamiyah Terrorist Network Operates." *ICG Asia Report N°43*. Jakarta/Brussels: International Crisis Group, 11 Desember 2002. [http://www.seasite.niu.edu/indonesian/islam/ICG-Indonesia Backgrounder JI.pdf](http://www.seasite.niu.edu/indonesian/islam/ICG-Indonesia_Backgrounder_JI.pdf).
- Jurdi, Syarifuddin. *Kekuatan-kekuatan Politik Indonesia; Kontestasi Ideologi dan Kepentingan*. 1 ed. Jakarta: Kencana, 2016.
- Karsono, Bambang. *Jejak Aktivistis JAT: Studi Kasus JAT & Jaringan Aceh-Pamulang*. Jakarta: Ubhara Jaya Press, 2018.
- "Karyawan Ramayana Bulukumba Diminta Berjilbab." *Tribun-Timur.com*, 30 Juni 2013. <http://makassar.tribunnews.com/2013/06/30/karyawan-ramayana-bulukumba-diminta-berjilbab>.
- Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam. "Mengetahui KPPSI Sulsel: Otonomi Khusus Sulawesi Selatan untuk Tegaknya Syariat Islam." Diktat. KPPSI, 2003.
- Mansyur, Syaikh Mushthafa. *Amal Jama'i*. Diterjemahkan oleh Abu Ridha. Cetakan Kedua. Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Ummat, 2003.
- Mariana, Dede. "Radikalisme Agama & Politik." *Pikiran Rakyat*, 2017.
- Nordholt, Henk Schulte, dan Gerry Van Klinken, ed. *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia dan KITLV-Jakarta, 2014.
- Ricklefs, M.C. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.

- Syam, Nur. *Tantangan Multikulturalisme Indonesia: Dari Radikalisme Menuju Kebangsaan*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Tantan, Hidayat, Zaenal Dalle, dan Kholis Bahtiar Bakri. "O...O... Komandan Terjebak Bom." *Gatra*. Laporan Utama, 25 Maret 2002.
- Tempo.co. "91 Persen Warga Sulawesi Selatan Mendukung Syariat Islam." *TEMPO Interaktif*, 17 Juli 2003. <https://nasional.tempo.co/read/1804/91-persen-warga-sulawesi-selatan-mendukung-syariat-islam>.
- — —. "Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam Sulsel Pertegas Urgensi." *TEMPO Interaktif*, 2 Februari 2010. <https://nasional.tempo.co/read/222968/komite-persiapan-penegakan-syariat-islam-sulsel-pertegas-urgensi/full&view=ok>.
- — —. "Polisi Tetapkan 6 Tersangka Bom Makassar." *TEMPO Interaktif*, 9 Desember 2003. <https://nasional.tempo.co/read/33921/polisi-tetapkan-6-tersangka-bom-makassar>.
- "Terdakwa Bom Makassar Akui Simpan 5 Karung Potasium." *detiknews*, 2 Juni 2005. <https://news.detik.com/berita/373692/terdakwa-bom-makassar-akui-simpan-5-karung-potasium>.
- Tim Peneliti Staf Ahli Bidang Sosial Budaya BIN. *Laskar Jundullah Sulawesi Selatan; Perspektif Keamanan dan Sosial Budaya*. Jakarta: Badan Intelijen Negara, 2009.
- Turmudi, Endang, dan Riza Sihbudi, ed. *Islam dan Radikalisme di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press, 2005.
- Vickers, Adrian. *Sejarah Indonesia Modern*. Diterjemahkan oleh Arif Maftuhin. Yogyakarta: Insan Madani, 2011.
- Zulfadli. "Radikalisme Islam dan Motif Terorisme di Indonesia." *AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam* 22, no. 1 (22 Juni 2017): 173. doi:10.32332/akademika.v22i1.570.